



Pendidikan Multikultural Ala Muhammadiyah: Membangun Toleransi di Indonesia

Hafidz Aghni Ma'ruf

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto,
hafidzmaruf21@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas pendidikan multikultural dalam perspektif Muhammadiyah sebagai upaya membangun toleransi di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Pendidikan multikultural dipahami sebagai pendekatan strategis untuk menanamkan nilai-nilai inklusivitas, keadilan, dan penghargaan terhadap perbedaan budaya, agama, dan etnis. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research) untuk mengkaji kontribusi Muhammadiyah dalam membangun masyarakat toleran melalui institusi pendidikannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan Muhammadiyah telah mengintegrasikan nilai-nilai multikultural ke dalam kurikulum, praktik kelembagaan, dan orientasi sosial, selaras dengan lima dimensi pendidikan multikultural menurut James A. Banks. Implementasi tersebut tercermin dalam pendirian kampus di daerah mayoritas non-Muslim, penyusunan kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyah berperspektif multikultural, serta komitmen terhadap perlindungan kelompok minoritas. Kajian ini menegaskan bahwa pendidikan multikultural ala Muhammadiyah memiliki kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 4), khususnya dalam menyediakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua.

Kata-kata kunci : Muhammadiyah, Pendidikan Multikultural, Toleransi, SDG 4.

Abstract

This article discusses multicultural education in Muhammadiyah's perspective as an effort to build tolerance amid the diversity of Indonesian society. Multicultural education is understood as a strategic approach to instill values of inclusiveness, justice, and respect for cultural, religious, and ethnic differences. This study uses library research to examine Muhammadiyah's contribution in building a tolerant society through its educational institutions. The results showed that Muhammadiyah education has integrated multicultural values into the curriculum, institutional practices, and social orientation, in line with the five dimensions of multicultural education according to James A. Banks. The implementation is reflected in the establishment of campuses in non-Muslim majority areas, the preparation of the Al-Islam and Kemuhammadiyah curriculum with a multicultural perspective, and the commitment to the protection of minority groups. This study confirms that Muhammadiyah-style multicultural education has a real contribution in supporting the achievement of Sustainable Development Goals (SDG 4), especially in providing inclusive and quality education for all.

Keywords: Muhammadiyah, Multicultural Education, Tolerance, SDG 4.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara multikultural dengan keberagaman budaya, agama, etnis, dan adat istiadat (Ari et al., 2023). Dengan adat istiadat dan dialek yang beragam, lebih dari 1.300 kelompok etnis tersebar di berbagai lokasi (daerah). Identitas nasional dibentuk oleh kelompok-kelompok etnis seperti Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Minangkabau, Dayak, dan Papua. Selain itu, enam agama resmi dengan berbagai praktik keagamaan diakui di Indonesia. Keragaman ini merupakan cerminan dari identitas bangsa dan kompleksitas sosial yang telah diwariskan dari generasi ke generasi (Akhmad & Rini, 2020).

Keberagaman Indonesia juga tampak dalam aspek budaya seperti kesenian, arsitektur, sistem kekerabatan, dan bahasa. Gotong royong menjadi nilai sosial yang diwariskan antargenerasi dan menjadi bukti solidaritas dalam keberagaman. Di Bali, sistem banjar dan adat Hindu Bali masih terjaga, sementara masyarakat Minangkabau mempertahankan sistem matrilineal yang hidup berdampingan dengan Islam. Selain itu, lebih dari 700 bahasa daerah digunakan dalam kehidupan sehari-hari, memperkaya interaksi sosial di berbagai daerah. Keberagaman ini merupakan aset nasional, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam menjaga persatuan dan harmoni sosial (Nursangadah et al., 2022).

Keberagaman yang tidak dikelola dengan baik dapat memunculkan kesalahpahaman, stereotip negatif, diskriminasi, dan konflik sosial. Intoleransi berbasis keyakinan, marginalisasi kelompok minoritas, serta politisasi identitas etnis menunjukkan bahwa keberagaman bisa menjadi sumber perpecahan jika tidak diantisipasi. Dalam masyarakat yang majemuk, minimnya kesadaran akan pentingnya toleransi dapat menyebabkan degregasi sosial dan melemahkan persatuan nasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah sistematis untuk menjaga harmoni sosial, salah satunya melalui pendidikan multicultural (Dr. Dra. Ni Desak Made Santi Diwyarthi et al., 2025).

Pendidikan multikultural berperan dalam menjaga harmoni sosial, terutama dalam menghadapi intoleransi, kekerasan berbasis agama, dan eksklusivisme identitas. Ketidaksensitifan sistem pendidikan terhadap keberagaman dapat memperkuat stereotip dan prasangka negatif, sehingga memperbesar potensi konflik. Oleh karena itu, pendidikan multikultural harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Dengan menanamkan kesadaran keberagaman sejak dini, peserta didik dapat memahami pentingnya menghormati perbedaan dan hidup berdampingan secara harmonis. Pendidikan multikultural juga bertujuan membentuk sikap terbuka dan solidaritas lintas identitas, sehingga menghasilkan individu yang mampu membangun masyarakat yang lebih damai dan berkeadilan (Khair et al., 2024).

Muhammadiyah, sejak awal berdiri, telah mengusung visi untuk memajukan masyarakat melalui pendidikan berbasis nilai-nilai Islam dan ilmu pengetahuan. Lembaga pendidikan Muhammadiyah menanamkan prinsip kemanusiaan universal dan inklusivitas (Abzar, 2024). Reformasi pendidikan Muhammadiyah mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan sekuler, menciptakan pendekatan holistik yang menyeimbangkan aspek spiritual dan intelektual (Mahesa et al., 2023). Model ini berkontribusi pada pembangunan masyarakat Indonesia dengan menanamkan nilai kemanusiaan *universal* dan multikulturalisme, (Muqtadir & Das, 2024).

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana pendidikan multikultural diimplementasikan dalam sistem pendidikan Muhammadiyah, baik dari perspektif historis, teoritis, maupun praktis. Secara khusus, kajian ini ingin memperkaya wacana akademik mengenai hubungan antara pendidikan, agama, dan keberagaman serta mendorong penguatan peran lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah dalam merawat harmoni sosial melalui dunia pendidikan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data melalui berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal

ilmiah, dokumen resmi, dan publikasi akademik. (Zed, 2008) mendefinisikan penelitian kepustakaan sebagai serangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan bahan penelitian dari referensi yang valid. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif-deskriptif, dengan fokus pada analisis isi dan interpretasi data konseptual mengenai pendidikan multikultural serta kontribusi pendidikan Muhammadiyah dalam membangun toleransi.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Multikultural

Keragaman budaya merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, keberagaman ini menuntut adanya pendekatan yang mampu mengakomodasi perbedaan budaya, bahasa, agama, dan latarbelakang sosial lainnya agar tidak terjadi deskriminasi atau ketimpangan dalam proses pembelajaran. Salah satu pendekatan yang dianggap mampu menjawab tantangan ini adalah pendidikan multikultural (Dr. Putu Eka Sura Adnyana et al., 2025).

Istilah “pendidikan” dan “multikultural” adalah akar kata dari pendidikan multikultural. Pendidikan adalah proses dimana seseorang atau sekelompok orang mengembangkan sikap dan perilaku mereka dalam usaha mendewasakan diri melalui pengajaran, pelatihan, prosedur dan metode pendidikan. Sementara kata kultur berasal dari kata *culture*, yang berarti budaya, tradisi kesopanan, atau pemeliharaan. Multikultural memiliki arti etimologis banyak, beragam, dan bermacam-macam. Pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai akibat dari keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran (agama) merupakan makna terminologis dari kata pendidikan dan multikultural (Dr. Dra. Ni Desak Made Santi Diwyarthi et al., 2025).

Pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai salah satu pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk mengakui dan menghargai keanekaragaman budaya masyarakat dan membangun sistem pendidikan yang adil dan bebas dari diskriminasi untuk semua orang (Banks, 2010). Pendidikan multikultural menurut James A. Banks adalah sebuah proses reformasi pendidikan yang berusaha membangun pendidikan yang peka terhadap keragaman budaya para siswanya (Banks, 2010).

James A. Banks menegaskan bahwa dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap siswa, pendidikan multikultural berupaya mengurangi ketidakadilan sosial ekonomi. Masyarakat yang adil dan inklusif di mana setiap orang dapat mencapai kesejahteraan tanpa dibatasi oleh perbedaan budaya harus dibangun melalui pendidikan. Selain itu, Banks menyoroti bahwa dalam masyarakat yang majemuk, pendidikan multikultural merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan sosial yang lebih besar. Mengingat kondisi pendidikan saat ini, di mana ketidaksetaraan sosial dan pendidikan masih menjadi masalah utama, sudut pandang ini masih sangat relevan (Banks, 2010).

James A. Banks mengidentifikasi terdapat lima dimensi utama yang menjadi pilar pendidikan multikultural. *Pertama*, konsep pendidikan tentang keadilan dan kesetaraan. Tanpa diskriminasi berdasarkan warna kulit, etnis, agama, atau asal-usul sosial lainnya, pendidikan multikultural harus menjamin bahwa setiap siswa memiliki akses yang sama terhadap kesempatan belajar dan sumber daya pendidikan. Tujuan dari gagasan ini adalah untuk mengakhiri kesenjangan pendidikan yang sering kali lebih menguntungkan kelompok

mayoritas daripada kelompok minoritas. *Kedua*, gagasan untuk mengakui perbedaan budaya. Keanekaragaman budaya diakui dan dihargai sebagai komponen identitas individu dalam pendidikan multikultural. *Ketiga* adalah penggabungan sudut pandang multikultural dalam kurikulum. Agar siswa dapat memahami sejarah, nilai, dan kontribusi kelompok lain dalam masyarakat, pendidikan multikultural harus memasukkan berbagai sudut pandang budaya ke dalam kurikulum. Ketidaksetaraan dalam pemahaman siswa tentang keragaman budaya dapat terjadi akibat kurikulum yang terlalu menekankan pada satu kelompok etnis. *Keempat*, Mengembangkan kesadaran kritis terhadap ketidakadilan sosial. *Kelima*, gagasan untuk menciptakan suasana belajar yang inklusif dan demokratis di mana setiap siswa dihormati dan diakui (Banks, 2010).

Perspektif Islam terhadap Keberagaman

Islam secara fundamental memandang keberagaman sebagai suatu fitrah dan bagian dari kehendak Allah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13, artinya

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Ayat ini memberikan landasan teologis yang kuat untuk konsep *ta'aruf* dalam Islam, atau saling mengenal satu sama lain. Ayat ini juga menekankan bahwa perbedaan identitas sosial entah itu etnis, bangsa, atau budaya bukanlah sebuah ancaman, melainkan cara untuk meningkatkan pemahaman dan memperkuat ikatan antar individu (Sari & Siregar, 2021).

Ayat tersebut (M. Q. Shihab, 2012) menafsirkan kata *lita'atafuu*, bukan hanya berarti berinteraksi, tetapi berinteraksi positif, selanjutnya dari akar kata yang sama pula setiap perbuatan baik dinamakan *ma'ruf*. Dengan demikian, pluralitas memang kehendak Allah Swt. Sehingga memberi isyarat atas kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan konsep kesamaan derajat diantara kemanusiaan diantara manusia. Hal ini kemudian menjadi berlaku *iniversal* dan menjadi bagian dari semangat multikulturalisme.

Selanjutnya, mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai keragaman. Segala gejala keragaman harus diterima, diakui, dan dihargai, hal tersebut senada dengan konsep *al-ta'adudiyat* (pluralisme) dan *al-tanawwu'* (keragaman) (Mustafida, 2021). Sebagaimana dalam QS Ar-Rum [30]:22, artinya

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”(QS Ar-Rum [30]:22) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini mengandung arti di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah penciptaan langit dan bumi. Dalam arti penciptaan langit dengan ketinggian, keluasan hamparan atapnya, kecemerlangan bintang-bintangnya yang tetap dan yang beredar. Serta penciptaan bumi dengan kerendahan dan ketebalannya serta beberapa kandungannya seperti bentuk gunung, oase, laut, padang pasir, hewan, dan pepohonan. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang berikutnya adalah perbedaan bahasa-bahasa yang ada. Ada yang berbahasa Arab, Tartar, Romawi, Prancis, Barbar, Habsyi, Hindi, Ajam, Armenia, Kurdi, dan masih banyak lagi. Keseluruhan dari keragaman bahasa tersebut tidak ada yang

mengajarkannya kecuali Allah (Mustafida, 2021).

Tanda-tanda selanjutnya adalah keragaman warna kulit manusia. Seluruh penduduk bumi, sejak diciptakannya Adam sampai hari akhir, semuanya memiliki dua mata, dua alis, satu hidung, dua buah pelipis, satu mulut, dan dua pipi. Meskipun demikian, antara satu dengan yang lainnya tidak memiliki kesamaan. Bahkan dibedakan satu sama lain antara jalannya, sikapnya atau pembicaraannya. Baik nyata ataupun tersembunyi yang hanya dapat terlihat jika melalui perenungan (Mursalin & Mu'ti, 2024).

Dari penafsiran yang telah disampaikan di atas, dapat kita ambil pengetahuan secara umum bahwasanya keberagaman merupakan *sunnatullah* yang harus direnungi dan diyakini setiap umat. Sehingga di dalam konsep multikulturalisme tersebut terkandung nilai-nilai penting dalam membangun keimanan. Adanya keragaman warna kulit dan dialektika merupakan realitas sosial yang tidak bisa dihindarkan. Sehingga kesadaran umat beragama akan keragaman tersebut menjadi kunci bagi keberlangsungan dalam menjalankan kehidupan yang harmonis.

Pendidikan Multikultural Ala Muhammadiyah

Menurut Muhammadiyah, pendidikan adalah alat utama untuk pencerahan (*tanwir*) dan pembebasan masyarakat dari kebodohan, ketidakadilan sosial, dan keterbelakangan. Sejak didirikan pada tahun 1912, Muhammadiyah telah menempatkan penekanan kuat pada pendidikan sebagai alat taktis untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam yang progresif dan mendidik Masyarakat (Nashir, 2014). Sudut pandang ini sejalan dengan gagasan pendirinya KH Ahmad Dahlan, yang menyoroti perlunya pendidikan. Akal yang sehat itu ialah akal yang siap menerima segala ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu merupakan kebutuhan akal agar bisa tetap sehat. KH Ahmad Dahlan menyatakan

“Akal itu bagaikan sebuah biji atau bibit yang terbenam dalam bumi, agar supaya bibit (akal) itu tumbuh dari bumi dan kemudian menjadi pohon yang besar, harus disiangi dan disiram terus-menerus. Demikian juga halnya dengan akal manusia, tidak akan rumbuh dan bertambah sempurna apabila tidak disirami dengan pengetahuan” (Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2019).

Penyamaan akal sebagai bibit agar sehat menerima ilmu itulah yang dimaksud dengan Pendidikan.

Sebuah gagasan muncul dalam dokumen Preadvis HB Muhammadiyah pada Kongres Islam Cirebon tahun 1921 ialah bahwa orang islam itu memiliki karakter pembelajar. Tertulis di dokumen tersebut kalimat “Jadi orang islam itu bersifat dua, yaitu: sifat guru dan sifat murid”. Sifat guru ialah karakter membelajari orang lain dari ilmu yang dikuasai. Sementara sifat murid ialah karakter haus ilmu sehingga terus membaca dan belajar kepada siapa saja yang bisa memberi ilmu (Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2019).

Selanjutnya, gagasan dasar Pendidikan Gerakan Muhammadiyah juga bersumber dari dokumen yang lahir di era kontemporer. Dalam Keputusan Muktamar ke-46 Yogyakarta tahun 2010 disebutkan gagasan tentang Revitalisasi Pendidikan Muhammadiyah. Bab 1 muqaddimah berjudul “Pendidikan Manusia yang Menghidupkan dan Membebaskan” menyatakan:

“Pendidikan merupakan upaya sadar penyiapan peluang bagi manusia untuk menguasai

ipteks berbasis wahyu tekstual (qauliyah) dan wahyu natural (kaunyah; alam semesta), mengembangkan kemampuan pemanfaatan alam semesta, menyerap seluruh prinsip perubahan peradaban bagi kesejahteraan seluruh umat manusia dalam bentangan masa depan Sejarah.” (Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2019).

Praktik berpendidikan sesuai dengan gagasan diatas adalah terbentuknya Lembaga atau majlis, yaitu: Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang). Dari praktik berpendidikan tersebut dapat dipahami beberapa aspek gagasan dasar tentang Pendidikan menurut cara pandang Muhammadiyah (Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2019).

Sebagai gerakan Islam modernis, Muhammadiyah berdedikasi untuk menciptakan sistem pendidikan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang majemuk (Maharani et al., 2024). Muhammadiyah memiliki sejarah panjang dalam membangun relasi yang inklusif dengan kelompok minoritas beragama. Sejak awal abad ke-20, Muhammadiyah menunjukkan keterbukaan terhadap keberagaman dalam praktik sosial dan dakwahnya. Kedekatannya dengan kelompok Ahmadiyah pada tahun 1924-1925, serta hubungan baik dengan komunitas Tionghoa pada Kongres ke-15 tahun 1926, mencerminkan sikap saling menghargai lintas identitas keagamaan dan etnis. Tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Djojogugito, Muhammad Husni, serta Ki Bagus Hadikusumo, bahkan terlibat aktif dalam interaksi kultural dan intelektual bersama dai Ahmadiyah Lahore. Di sisi lain, komunitas Tionghoa turut mendukung perhelatan penting Muhammadiyah, yang menunjukkan adanya dialog dan kerja sama lintas komunitas secara timbal balik pada masa itu (Muthohirin & Press, 2025).

Dalam perkembangan pemikiran, sejumlah tokoh Muhammadiyah menunjukkan kepedulian serius terhadap isu keberagaman dan perlindungan kelompok minoritas beragama. Haedar Nashir, sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020, secara tegas menyatakan bahwa melindungi minoritas merupakan bagian dari menjaga platform kebangsaan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa orientasi gerakan Muhammadiyah sejalan dengan peran civil society yang tidak hanya mengontrol kekuasaan negara, tetapi juga menciptakan kohesi sosial (Muthohirin & Press, 2025). Ahmad Syafii Maarif pun menunjukkan arah pemikiran serupa, antara lain melalui penerbitan *Tafsir Tematik Al-Qur'an tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama* oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, yang meskipun menuai polemik, mencerminkan upaya Muhammadiyah dalam merespons dinamika masyarakat multicultural (Islam, 2000). Di samping itu, sikap Buya Hamka yang memilih pendekatan titik temu dalam menyikapi perbedaan, termasuk terhadap Syiah, menjadi representasi konkret dari etika keberagaman yang diusung oleh para tokoh Muhammadiyah (Rusydi, 1983).

Komitmen terhadap nilai-nilai multikulturalisme juga tercermin dalam berbagai praktik nyata yang dilakukan oleh Muhammadiyah secara kelembagaan. Muhammadiyah mendirikan enam perguruan tinggi di wilayah mayoritas non-Muslim, seperti di Sorong, Kupang, dan Maumere, dengan proporsi mahasiswa non-Muslim yang mencapai 60%-80%. Melalui Majelis Diktilitbang, Muhammadiyah bahkan tengah menyusun pedoman Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) perspektif multikultural, yang dirancang untuk mahasiswa non-

Muslim dengan pendekatan ilmiah, terbuka, dan non-indoktrinatif. Selain itu, dalam Mukhtamar ke-47 di Makassar, Komisi IV secara eksplisit membahas pentingnya penghormatan terhadap kelompok minoritas dan peran Muhammadiyah sebagai mediator dalam konflik berbasis agama. Upaya ini menunjukkan kesadaran Muhammadiyah terhadap peran strategisnya dalam merawat pluralitas bangsa (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015).

Landasan normatif dari gerakan Muhammadiyah dalam membangun kehidupan beragama yang toleran bersumber dari ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Dalam konteks ini, Muhammadiyah melakukan objektifikasi terhadap nilai-nilai keislaman, sebagaimana ditekankan oleh Kuntowijoyo, yakni dengan menjadikan Islam sebagai sumber keadilan, perdamaian, dan perlindungan bagi seluruh warga tanpa diskriminasi. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti al-Maidah: 8 tentang keadilan, al-Ma'un tentang kepedulian sosial, serta al-Hujurat: 10 dan 12 tentang pentingnya ukhuwah dan menjauhi prasangka, menjadi rujukan moral dalam membangun harmoni sosial. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil Muhammadiyah, baik secara pemikiran, kelembagaan, maupun praksis sosial, merupakan bagian integral dari ikhtiar meneguhkan nilai-nilai Islam yang inklusif dan humanis (A. Shihab, 2016).

Kurikulum Muhammadiyah di sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah dirancang secara integratif dengan memadukan pengetahuan umum, pengetahuan keislaman, dan nilai-nilai kebangsaan. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk lulusan yang memiliki keterampilan intelektual, integritas moral, dan kesadaran kebangsaan yang tinggi. Kurikulum ini juga mengajarkan tentang hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang majemuk dan membangun tanggung jawab sosial sebagai bagian dari pekerjaan mereka (Pribadi et al., 2024).

Pendidikan multikultural Muhammadiyah diperkuat oleh kegiatan ekstrakurikuler yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Organisasi siswa seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Tapak Suci, dan Hizbul Wathan menggunakan kegiatan ini sebagai alat strategis untuk mendorong karakter siswa. Kegiatan-kegiatan ini mengajarkan siswa keterampilan sosial yang diperlukan untuk membangun hubungan lintas identitas dalam masyarakat yang heterogen dengan menekankan prinsip-prinsip kebangsaan dan Islam.

Analisis terhadap pendidikan multikultural ala Muhammadiyah

Pendidikan multikultural dalam pendidikan Muhammadiyah memiliki relevansi tinggi dengan teori yang dikemukakan oleh James A. Banks. Penerapan pendidikan multikultural dalam gerakan Muhammadiyah dapat dianalisis melalui lima dimensi sebagaimana dikemukakan oleh James A. Banks.

Pertama, dalam hal keadilan dan kesetaraan, Muhammadiyah menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak-hak dasar kelompok minoritas beragama sebagai organisasi Islam berdasarkan Darul Ahdi wa Syahadah. Komitmen ini tercermin dalam pembentukan beberapa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di daerah yang mayoritas non-Muslim, seperti Sorong, Kupang, dan Maumere. PTM ini memberikan akses ke pendidikan tinggi kepada siswa dari berbagai agama, bahkan dengan proporsi siswa non-Muslim mencapai 60 hingga 80 persen.

Kedua, dimensi pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Sejarah Muhammadiyah menunjukkan pemahaman dan penghormatan terhadap keragaman etnis. Muhammadiyah telah membangun hubungan dengan komunitas Tionghoa dan kelompok

Ahmadiyah. Partisipasi orang Tionghoa dalam Kongres Muhammadiyah pada tahun 1926 merupakan indikasi penerimaan terhadap keragaman budaya. Penghormatan terhadap keragaman intra-Islam juga ditunjukkan oleh tindakan individu seperti Buya Hamka, yang mengambil sikap toleran terhadap komunitas Syiah dan mendorong dialog dengan pemeluk agama lain.

Ketiga, pada dimensi penggabungan perspektif multikultural dalam kurikulum, melalui Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang), telah membuat pedoman pembelajaran untuk mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) dengan menggunakan perspektif multikultural. Dengan judul “Islam dan Agama-Agama Dunia,” yang disusun secara obyektif dan tanpa indoktrinasi, kurikulum ini tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa Muslim, namun juga dimodifikasi secara signifikan dan metodologis bagi mahasiswa non-Muslim.

Keempat, Muhammadiyah sangat menyadari ketidakadilan sosial, terutama dalam memperjuangkan hak-hak minoritas. Sebuah pernyataan yang dibuat oleh Haedar Nashir bahwa melindungi kelompok minoritas merupakan bagian dari melindungi platform kebangsaan mencerminkan posisi kritis Muhammadiyah terhadap dinamika ketidakadilan sosial yang terjadi dalam kehidupan nasional.

Kelima, Muhammadiyah juga membangun lingkungan belajar yang inklusif dan demokratis. Hal ini dicapai melalui pelaksanaan pembelajaran AIK yang tidak bersifat dogmatis, melainkan berbasis pada pendekatan ilmiah yang inklusif. Mahasiswa non-Muslim tidak diposisikan sebagai objek dakwah dalam proses pembelajaran, tetapi sebaliknya dihormati atas hak dan kebebasannya untuk memahami Islam secara objektif.

Secara keseluruhan, tindakan Muhammadiyah dalam menangani keberagaman agama dan budaya menunjukkan orientasi praktis dari ajaran Islam yang *rahmatan lil'alamin*, serta kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip pendidikan multikultural yang diusulkan oleh Banks. Ini juga menunjukkan kesiapan Muhammadiyah untuk menanggapi tantangan zaman yang kian plural secara konstruktif dan inklusif.

Relevansi dengan SDG 4

Pendidikan multikultural Muhammadiyah memiliki relevansi yang kuat terhadap upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 4 yang berfokus pada pendidikan berkualitas dan SDG 6 yang menekankan akses terhadap air bersih serta sanitasi layak. Keduanya merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, yang sejak awal telah menjadi perhatian utama dalam sistem pendidikan Muhammadiyah.

SDG 4 menekankan pada penyediaan pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang. Muhammadiyah, melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah-daerah dengan mayoritas non-Muslim, seperti Universitas Muhammadiyah Sorong dan IKIP Muhammadiyah Maumere, telah berkontribusi secara konkret dalam membuka akses pendidikan bagi kelompok-kelompok minoritas. Proporsi mahasiswa non-Muslim yang mencapai hingga 80% menjadi indikator kuat bahwa pendidikan Muhammadiyah bersifat inklusif, tanpa diskriminasi berdasarkan agama atau latar belakang sosial budaya.

Lebih dari itu, pengembangan kurikulum *Al-Islam dan Kemuhammadiyah* (AIK) *Perspektif Multikultural* mencerminkan upaya sistematis dalam menciptakan lingkungan belajar yang menghormati keragaman, mendorong kesetaraan, dan membangun pemahaman lintas budaya. Ini sangat sejalan dengan target SDG 4.7, yaitu memastikan bahwa semua pelajar memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui pendidikan untuk hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non-kekerasan, serta apresiasi terhadap keragaman budaya.

Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap berbagai inisiatif dan sikap Muhammadiyah dalam merespons kemajemukan, dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan pendidikan multikultural yang inklusif dan transformatif. Muhammadiyah tidak hanya mengakui keberagaman budaya, agama, dan etnis sebagai realitas sosial, tetapi juga menjadikannya sebagai basis penting dalam merumuskan kebijakan dan praksis pendidikan. Pendirian perguruan tinggi di wilayah mayoritas non-Muslim, penyusunan kurikulum *Al-Islam dan Kemuhammadiyah* (AIK) berperspektif multikultural, serta keterlibatan tokoh-tokoh intelektual Muhammadiyah dalam memperjuangkan hak kelompok minoritas merupakan bukti konkret dari komitmen tersebut. Seluruh upaya ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk menanamkan nilai keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap perbedaan, yang selaras dengan prinsip-prinsip pendidikan multikultural menurut James A. Banks.

Lebih jauh, gerakan Muhammadiyah dalam ranah pendidikan multikultural memiliki relevansi kuat dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 4), khususnya dalam menjamin pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas. Pengintegrasian perspektif pluralisme ke dalam kurikulum serta penghapusan diskriminasi dalam akses pendidikan merupakan langkah progresif dalam mendukung terciptanya masyarakat yang toleran dan berkeadaban. Dengan menjadikan multikulturalisme sebagai bagian integral dari pendidikan, Muhammadiyah tidak hanya berperan sebagai institusi keagamaan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berkontribusi terhadap pembangunan bangsa yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan universal. Keseluruhan upaya ini menegaskan bahwa pendidikan multikultural bukan sekadar wacana, melainkan praksis nyata yang dijalankan dengan kesadaran historis, teologis, dan sosiologis yang mendalam.

Daftar Rujukan

- Latief, H. (2013). *Melayani Umat*. Gramedia Pustaka Utama.
- Abzar, M. (2024). Pendidikan Islam Multikultural Tinjauan Literatur Perguruan Muhammadiyah : Studi Multicultural Islamic Education at Muhammadiyah Universities : Literature Review Study. *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 19(1), 81–92. <https://doi.org/10.56338/iqra.v19i1.4432>
- Akhmad, N., & Rini, I. (2020). *Ensiklopedia Keragaman Budaya*. Alprin. <https://books.google.co.id/books?id=wUDYDwAAQBAJ>
- Ari, A. P., Ridha, A. F., & Zaki, A. A. (2023). Integrasi Nasional Sebagai Upaya Menghadapi Tantangan Dalam Keberagaman. *indigenous Knowlegge*, 2(6), 424–430.
- Banks, J. A. (2010). *Multicultural Education*. London: Allyn and Bacon Press.

- Dr. Dra. Ni Desak Made Santi Diwyarthi, M. S., I Wayan Adi Pratama, S. T. P. M. P., Alfiyanti Nurkhasyanah, M. P., Prof. Dr. Drs. Ridwin Purba, M. P., Srirahayu Puspawati, M. A., Khasanah, S. P. M. K. M. P., Prof. Dr. Herman, S. P. M. P., Mery Chris Isabella Saragih, S. P. M. S., Yusna Bantulu, S. P. M. A., & Bangun Munthe, S. P. M. M. (2025). Pendidikan Multikultural. Batam: Cendikia Mulia Mandiri. <https://books.google.co.id/books?id=s5RYEQAAQBAJ>
- Dr. Putu Eka Sura Adnyana, M. A. M. H., Fritz Hotman S. Damanik, S. S. M. P., Dr. c. Aswadi Jaya, S. P. M. M. M. P. C. H. T., Amar Halim, S. P. I., Pipit Utami, M. P., & Dr. H. Endang Iryani, M. P. (2025). PENDIDIKAN MULTIKULTURAL. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=UL5aEQAAQBAJ>
- Islam, T. M. T. dan P. P. H. (2000). Tafsir Tematik Al-Quran tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama. Yogyakarta:Pustaka SM dan MTPPI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Khair, M., Tang, M., & Mubarak, M. (2024). Peserta Didik Yang Berwawasan Multikultural : Studi Literatur. rnal Inovasi Pendidikan dan Pengajaran, 4(2), 1–23.
- Maharani, R., Berbyani, L. V. N., Meilani, E. D., Puspitaningrum, F., & Alditia, F. (2024). Peran Muhammadiyah dalam Transformasi Sosial dan Pendidikan. Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper Pengembangan Dakwah, Pondok Al Islam dan Kemuhammadiyah, 118–122.
- Mahesa, A. B., Faisal Ramadhan, Tri Wirahadi Kusuma, Muhammad Farid Alfian, & Febri Nur Hudanansyah. (2023). Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pembaharuan Pendidikan Islam. JURNAL SOSIAL Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 24(2), 68–74. <https://doi.org/10.33319/sos.v24i2.133>
- Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2019). Jejak-Jejak Filsafat Pendidikan Muhammadiyah: Membangun Basis Etis Filosofis bagi Pendidikan. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Muqtadir, A., & Das, S. W. H. (2024). Multicultural Education Paradigm Based Islamic Religious Education in Indonesia. 2, 01–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.70062/harmonyphilosophy.v2i1.27>
- Mursalin, H., & Mu'ti, A. (2024). Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Islam. Rayah Al-Islam, 8(2), 617–635.
- Mustafida, F. (2021). PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL - Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada. <https://books.google.co.id/books?id=6lsaEAAAQBAJ>
- Muthohirin, N., & Press, U. M. M. (2025). STUDI-STUDI ISLAM KONTEMPORER: PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL, TRANSFORMASI SALAFISME DAN DAKWAH DIGITAL. <https://books.google.co.id/books?id=k5JdEQAAQBAJ>
- Nashir, H. (2014). Memahami Ideologi Muhammadiyah. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nursangadah, A., Fitrah, P. F., Agustiniingsih, S., Husna, F. N., & Ni'mah, U. K. (2022). Multikulturalisme Di Indonesia: Relevansi Pancasila, Islam, Dan Kebangsaan. Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan, 2, 253–269.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2015). Muhammadiyah dan isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal.
- Pribadi, I., Pajarianto, H., Nasriandi, N., Anuar, A. B., Galugu, N. S., & Yusuf, M. (2024). PENGUATAN IKLIM AKADEMIK TOLERAN DI PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH: PERSPEKTIF PEACE EDUCATION. Penerbit Widina.

- <https://books.google.co.id/books?id=vbA0EQAAQBAJ>
- Rusydi, H. (1983). *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Sari, I. K., & Siregar, N. (2021). Pendidikan multikultural dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. *Hikmah*, 18(2), 108–118.
- Shihab, A. (2016). *Membendung Arus: Pentrasi Gerakan Muhammadiyah terhadap Misi Kristen di Indonesia*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir al-Mishbāh: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati. <https://books.google.co.id/books?id=wKomjwEACAAJ>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ>